

>> Rencana Kerja
Bappelitbang Tahun 2025

RENCANA KERJA BAPPELITBANG 2025



Pemerintah Kab. Tapin

**Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan**

BAPPELITBANG 2024



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**** BUPATI TAPIN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB : PENUTUP
- (2) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. RSUD Datu Sanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- q. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Kecamatan Piani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Kecamatan Lokpaikat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan apin Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- ff. Kecamatan Bakarangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Candi Laras Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Hatungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Salam Babaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Tapin Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Tapin Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Binuang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Bungur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ss. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal **11 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun **Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin (RENJA Bappelitbang) Tahun 2025** secara tepat waktu. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENJA Bappelitbang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategi (Renstra) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 yang memuat gambaran umum, tugas pokok, serta tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan periode tersebut yang hendak dicapai. RENJA Bappelitbang Tahun 2025 juga menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

RENJA Bappelitbang Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan pemerintah daerah yang mengarahkan Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. RENJA Bappelitbang Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun paparan isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2025.

Rantau, Juli 2024

Kepala Bappelitbang Kab. Tapin,



Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, S.E., M.E.
NIP. 198405222 200803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	Bab I-1
2. Landasan Hukum	Bab I-2
3. Maksud dan Tujuan.....	Bab I-5
4. Sistematika Penulisan.....	Bab I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2023 dan Capaian	
RENSTRA Bappelitbang.....	Bab II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	Bab II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Bappelitbang.....	Bab II-20
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	Bab II-21
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Bab II-21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Bab III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbang.....	Bab III-3
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	Bab IV-1
BAB V PENUTUP	
Bab IV-1	
Lampiran	Lamp-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023	Lamp-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2023	Bab II-19
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD.....	Lamp-15
Tabel 2.4 Usulan Program dari Pemangku Kepentingan.....	Bab II-22
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappelitbang	Bab III-3
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program	Bab IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Disamping itu penyusunan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan, tahap penyusunan Rancangan Awal, tahap penyusunan Rancangan, tahap penyusunan Rancangan Akhir, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Renja akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Bappelitbang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan maka dengan sendirinya Bappelitbang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergi dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta pemutakhirannya;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarustamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026; (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah guna terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dan sebagai pedoman dalam kegiatan kelitbangan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 yaitu:

- ✓ Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbang.
- ✓ Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan dan pengendalian serta kelitbangan yang bertanggung jawab.
- ✓ Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan

kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian target RENSTRA 2018-2023, perkiraan capaian Renja tahun 2024, dan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Bappelitbang, penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan dan sub kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2023 dan capaian Renstra Bappelitbang

Evaluasi rencana kerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, melalui pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2023. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Bappelitbang Kabupaten Tapin.

Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappelitbang tahun 2023 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp33.130.100,00 dan terealisasi sebesar Rp29.959.800,00 atau sebesar 90.43%.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan laporan akhir Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp16.738.284,00 dan terealisasi sebesar Rp9.380.000,00 atau sebesar 58.10%.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini mendukung penyediaan Gaji dan tunjangan untuk ASN Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp4.242.180.272,00 dan terealisasi sebesar Rp4.093.650.491,00 atau sebesar 98.60%.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan laporan keuangan Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp25.393.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.080.000,00 atau sebesar 98.80%.

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp26.194.040,00 dan terealisasi sebesar Rp24.349.500,00 atau sebesar 92.96 %.

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tersedianya kebutuhan listrik dalam mendukung kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp92.077.570,00 dan terealisasi sebesar Rp12.167.456,00 atau sebesar 13.21 %.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang penting untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.525.717.005,00 dan terealisasi sebesar Rp1.251.239.510,00 atau sebesar 82.01%.

1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp205.705.087,00 dan terealisasi sebesar Rp117.809.500,00 atau sebesar 57.27%.

1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini mendukung keperluan pencetakan dan pengadaan untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp51.292.377,00 dan terealisasi sebesar Rp41.693.750,00 atau sebesar 81.29%.

1.3.5. Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp289.221.035,00 dan terealisasi sebesar Rp94.803.200,00 atau sebesar 32.78%.

1.3.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini mendukung dalam penyediaan jamuan untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp25.209.250,00 dan terealisasi sebesar Rp22.770.000,00 atau sebesar 90.32%.

1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp2.481.109.750,00 dan terealisasi sebesar Rp2.228.457.957,00 atau sebesar 89.82%.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang pengadaan barang maupun jasa yang diperlukan untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp575.537.882,00 dan terealisasi sebesar Rp374.070.650,00 atau sebesar 64.99%.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp586.003.928,00 dan terealisasi sebesar Rp420.193.407,00 atau sebesar 74.24%.

1.5.2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp283.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp173.143.300,00 atau sebesar 61.13%.

1.5.3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp124.282.320,00 dan terealisasi sebesar Rp100.816.600,00 atau sebesar 81.12%.

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam hal menyediakan pemeliharaan Kendaraan Dinas Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp186.900.980,00 dan terealisasi sebesar Rp123.699.318,00 atau sebesar 86.18%.

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp70.735.620,00 dan terealisasi sebesar Rp22.036.320,00 atau sebesar 31.15%.

II. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah” dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur. Adapun Sub Kegiatan yang ada di dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur. Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu dalam melaksanakan koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan melalui hybrid.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan tepat dan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp91.268.900,00 dan terealisasi sebesar Rp69.544.000,00 atau sebesar 76.20%.

2.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini melaksanakan asistensi atau pembinaan kepada Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur, dengan keluaran kompilasi dokumen Rencana Kerja Mitra Bidang. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan ini menghadapi kendala yaitu masih ada beberapa SKPD yang terlambat melaporkan Renja PD dari jadwal yang sudah ditentukan.
- Dokumen yang disampaikan oleh SKPD masih terdapat ketidaksesuaian dengan sistematika penyusunan dokumen Renja PD.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp72.308.050,00 dan terealisasi sebesar Rp62.108.000,00 atau sebesar 85.89%.

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Infrastruktur. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang mitra bidang infrastruktur ini yaitu:

- Dalam pengisian format yang ditentukan, sebagian SKPD format masih tidak terisi dengan benar.
- SDM dari SKPD yang menangani Monev Perangkat Daerah sering berganti personil, sehingga pelaporan yang disampaikan tidak optimal.
- Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp51.562.200,00 dan terealisasi sebesar Rp38.990.000,00 atau sebesar 75.62%.

2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan hybrid dengan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD bisa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp124.457.400,00 dan terealisasi sebesar Rp117.870.000,00 atau sebesar 94.71%.

2.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kegiatan ini terkendala karena masih adanya beberapa SKPD yang terlambat memenuhi jadwal asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah dari jadwal yang sudah ditentukan. Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp59.700.600,00 dan terealisasi sebesar Rp51.830.000,00 atau sebesar 86.82%.

2.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral; Membimbing secara teknis/fasilitasi/supervisi dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Ekonomi. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Ekonomi:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.

- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp44.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau sebesar 84.60%.

2.2.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Total anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp59.700.600,- dan dapat diserap sebesar Rp51.830.000,- atau sebesar 86,82% dari total anggaran.

2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Dengan keterbatasan tersebut, agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan baik, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat endemik bisa dilakukan melalui hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.

- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp91.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.162.000,00 atau sebesar 84.15%.

2.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang Sosial (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD). Manfaat yang diberikan dari terlaksananya sub kegiatan ini adalah:

- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- Kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yang masih masa transisi endemik yang belum berakhir menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian renja dilaksanakan secara hybrid.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp77.638.479,00 dan terealisasi sebesar Rp76.265.000,00 atau sebesar 98.23%.

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD). Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan Mitra Bidang Sosial. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Sosial ini, terdapat kendala yaitu:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari

perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.

- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/ rumus masih banyak yang perlu dikoreksi
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang Sosial
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp59.033.479,00 dan terealisasi sebesar Rp47.600.000,00 atau sebesar 80.63%.

2.3.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik. Agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan lancar, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat enndemik bisa dilakukan secara hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp108.533.400,00 dan terealisasi sebesar Rp70.800.000,00 atau sebesar 85.23%.

2.3.5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang SDM (kebijakan teknis perencanaan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah). Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp77.394.950,00 dan terealisasi sebesar Rp63.150.000,00 atau sebesar 81.59%.

2.3.6. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghasilkan 4 laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan mitra bidang SDM. Pelaksanaan Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Terjalin sinegritas dan harmonisasi antar dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD mitra sub bidang SDM ini terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU masih dilakukan secara manual, sehingga SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi.
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang SDM.

- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp58.347.500,00 dan terealisasi sebesar Rp43.745.000,00 atau sebesar 74.97%.

III. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah” dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

3.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

3.1.1. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD yang dilaksanakan secara online dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara lain kondisi jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp58.309.375,00 dan terealisasi sebesar Rp49.490.000,00 atau sebesar 84.87%.

3.1.2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp282.187.542,00 dan terealisasi sebesar Rp210.500.500,00 atau sebesar 74.60%.

3.1.3. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan

Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu belum tersedianya data-data dalam mendukung penyusunan RKPD, terlambatnya data yang dibutuhkan dari SKPD lain, adanya perubahan sub kegiatan pada menu SIPD untuk kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 67.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Keterbatasan ini diakibatkan karena proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup panjang. Koordinasi antara Bappelitbang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin dan Pusat yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan sub kegiatan ini.

3.1.4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp318.755.631,00 dan terealisasi sebesar Rp306.171.500,00 atau sebesar 96.05 %.

3.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.164.102.387,00 dan terealisasi sebesar Rp953.455.100,00 atau sebesar 81.90%. Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada Bappelitbang Kabupaten Tapin sepanjang tahun anggaran 2023 terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara online dan offline dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.

- Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang masih terdapat kendala menyebabkan proses Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terganggu.

3.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum tersedia data pembangunan secara maksimal baik secara umum maupun dari SKPD. Dengan dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp242.512.500,00 dan terealisasi sebesar Rp223.450.000,00 atau sebesar 92.14%.

3.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp280.466.600,00 dan terealisasi sebesar Rp201.980.300,00 atau sebesar 67.34%.

3.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp404.310.265,00 dan terealisasi sebesar Rp375.454.000,00 atau sebesar 92.86%. Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.

3.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp134.042.525,00 dan terealisasi sebesar Rp73.510.000,00 atau sebesar 54.84%, masih memiliki kendala antara lain:

- Ada beberapa SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Bappelitbang

- Untuk rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkendala karena pandemi Covid-19
- Format yang diisi oleh SKPD belum terisi dengan benar.

Solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian yaitu:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat pandemi bisa dilakukan melalui Video Conference dan offline dengan protokol kesehatan yang ketat.
- Melakukan sosialisasi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Proses kerjasama dengan BPS akan dilaksanakan pada awal tahun.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Manfaat dari Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pengendalian ini adalah:

- Selarasnya sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah;
- Program prioritas Kepala Daerah tahun 2023 terakomodir dalam RPJMD;
- Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan pada tahun berkenaan sebesar 100 persen.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian rencana kerja dan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan.
- Adanya refocusing anggaran sehingga monitoring dan evaluasi capaian target dan realisasi kinerja SKPD tidak maksimal.

Program ini juga telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis

Bappelitbang “meningkatkan kualitas perencanaan”.

IV. Program Penelitian dan Pengembangan

Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah dilatar belakangi oleh adanya permasalahan/isu-isu strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bidang Litbang memiliki fungsi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis kinerja/outcome. Dengan slogan “*We Are Contribute For Tapin Research Development And Innovation*” Bidang Litbang melaksanakan tugas dalam Penelitian ilmiah dan Inovasi yang diperlukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan/isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Sasaran strategis pada Bidang Litbang adalah “Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti” dengan indikator persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti. Manfaat dari program ini yaitu menghasilkan berbagi rekomendasi hasil kebijakan yang digunakan oleh SKPD, masyarakat dan stakeholder terkait dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Program ini mendukung tercapainya sasaran strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya Hasil Kelitbangan” Namun demikian dalam penguatan fungsi kelitbangan dan pelaksanaan program masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Waktu penelitian dan cakupan lokasi penelitian yang cukup luas sedangkan lama waktu penelitian hanya 4 bulan.
2. Data sekunder yang sangat terbatas terutama untuk data-data yang bersifat mikro dengan basis unit wilayah terkecil yaitu desa, sehingga hasil penelitian masih cukup bias hanya mengandalkan data interpolasi berbasis wilayah kecamatan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan *primary data collection* dengan metode pengambilan sampling sesuai dengan teknik analisis yang diperlukan dalam penelitian.
3. Litbang masih belum memiliki data citra satelit resolusi tinggi padahal data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi strategi perencanaan pembangunan daerah berbasis *regional science*.
4. Sumber daya manusia yang masih terbatas dikarenakan litbang tapin masih belum memiliki fungsional peneliti untuk menunjang penguatan fungsi litbang daerah.

Pelaksanaan program di Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah berupa

hasil penelitian/kajian maka *outcome* yang dihasilkan berupa kajian-kajian yang mana rekomendasinya ditujukan kepada SKPD terkait, yang akan ditindak lanjuti pada tahun 2023.

Program ini juga telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang “meningkatkan hasil kelitbang” dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

4.1.1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Sub-kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Indikator Utama Daerah terkait peningkatan angka harapan lama sekolah dengan menyediakan data terkait. Penelitian yang dilaksanakan berjudul penelitian Strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin hasil kerjasama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada menghasilkan 57 rekomendasi dan dapat dimanfaatkan oleh 9 SKPD yang terdiri dari: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp259.513.476,00 dan terealisasi sebesar Rp220.993.000,00 atau sebesar 85.16% dari total Anggaran.

4.1.2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

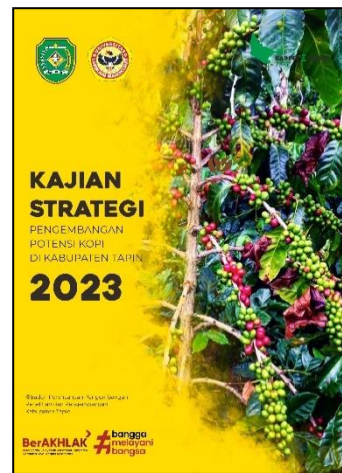
Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan Strategi Pengembangan Potensi Kopi di Kabupaten Tapin hasil co research dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat menghasilkan 17 rekomendasi dan dapat dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari: Dinas Pertanian, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Piani, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Piani, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hatungun. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp158.055.050,00 dan terealisasi sebesar Rp126.272.000,00 atau sebesar 79.89% dari total Anggaran.

4.2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, dengan total pagu sebesar Rp709.693.034,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp553.054.508,- atau 77,92% dari alokasi anggaran yang ada. Rincian

sub kegiatan pendukung kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi ini adalah:

4.2.1. Penelitian Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sub-kegiatan ini melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul penelitian Penyediaan Sarana Peningkatan Kualitas Air Tapin (SIMONKAT) hasil kerjasama dengan Politeknik Negeri Semarang menghasilkan alat pemantauan kualitas air yang dimanfaatkan langsung oleh PDAM Tapin melalui Surat Keputusan Direktur PDAM Nomor 16/KPTS/PDAM-TP/V/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Monitoring Kualitas Air SIMONKAT PDAM Kabupaten Tapin.



Hasil penelitian ini dapat didownload secara gratis pada website www.e-starlitbang.tapinkab.go.id pada menu repository. Sarana penelitian yang kurang memadai karena tidak memiliki GPS untuk membuat analisis spasial lanjutan. Kurangnya local resources untuk tema-tema penelitian yang sifatnya teknis, hal ini dikarenakan pejabat fungsional peneliti dan analis pemanfaatan IPTEK memiliki keterbatasan dari bidang ilmu yang dikuasai. Wilayah penelitian cukup luas sehingga teknik pengambilan sampling masih belum maksimal. Lamanya proses review untuk naskah publikasi penelitian. Ruang lingkup peneliti dan analis pemanfaatan IPTEK yang sangat dibatasi, sulit untuk mengembangkan diri karena kurangnya peningkatan kompetensi yang bersifat teknis dari institusi. Dana yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah Rp207.881.460,00 dan terealisasi sebesar Rp171.805.000,00 atau sebesar 82.65% dari total Anggaran.

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 (Terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbang

Analisis kinerja pelayanan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin bukan kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat, namun kinerja pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah terkait misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin” Mengedepankan prinsip *good governance* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ” adalah *menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjalankan fungsi Bappelitbang dengan berdasarkan 14 prinsip good governance, yaitu 1)Wawasan ke Depan, 2)Keterbukaan dan Transparansi, 3)Partisipasi Masyarakat, 4)Akuntabilitas, 5)Supremasi Hukum, 6)Demokrasi, 7)Profesionalisme dan Kompetensi, 8)Daya Tanggap, 9)Keefisienan dan Keefektifan, 10) Desentralisasi, 11)Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat, 12)Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan, 13)Komitmen pada Lingkungan Hidup, dan 14)Komitmen Pasar yang Fair.*

Ada dua indikator kinerja sasaran dan lima Indikator Kinerja Utama pada Bappelitbang Kabupaten Tapin yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam 4 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan dan sekiranya dapat membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang ditetapkan Bappelitbang dapat dilihat pada tabel 2.2.:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	-	-	90%	90%	100%	100%	-	-		-	-	-
2	Persentase capaian kinerja SKPD	-	-	90%	90%	100%	100%	-	-		-	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	-	-	90%	80%	100%	100%	-	-		-	-	-
Indikator Kinerja Utama Perubahan													
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	-	Score 6,2	Score	Score 7,2	Score 6,2	Score 6,68	Score 7,2	Score 7,75	Score 8,2	-
2	Indeks Government Award (IGA)	-	-	-	-	-	Score 65	-	-	Score 52,94	Score 65	Score 67	-
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	BB	BB	-	-	86,50	78,35	82,00	-
4	Indeks Profesionalitas ASN (IP- ASN)	-	-	-	-	-	70	-	-	47,80	70	72	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan SDM;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan nketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappelitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan melaksanakan amanat perundang-undangan secara optimal, maka dalam penyusunan rencana kerja perlu memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dan penganggaran daerah dengan evaluasi serta pengendalian pembangunan;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat;
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (*e-planning*) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya, agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.
4. Peningkatan kesadaran aparatur terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan kesadaran aparatur terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
6. Kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbang) belum berjalan dengan baik.

2.4. Review Terhadap dokumen RKPD

Review terhadap dokumen RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappelitbang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbang berdasarkan RKPD. *Review* terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3. sebagai berikut (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah, merupakan sistem pendekatan perencanaan bawah atas (*bottom -up planning*) yang didasarkan atas azas demokrasi dan desentralisasi, selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tidak ada menerima atau menelaah usulan program ataupun kegiatan yang berasal langsung dari pemangku kepentingan. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Adapun pilar penyusun visi Indonesia Tahun 2045 ada 4 (empat) sasaran yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan;
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan per Kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan 0% dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Adapun agenda atau misi pembangunan nasional tahun 2025-2045 adalah:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan
7. Dukungan sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesenambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas

Sasaran utama visi rencana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Visi pembangunan periode 2021-2026 merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Adapun VISI pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025 yaitu “Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri”. Dengan Misi pembangunannya yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial budaya dan agama.

Untuk periode tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Misi Pembangunan tahun 2021-2026 yaitu:

1. Membangun SDM yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
3. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.
4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.
5. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

Fokus pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 diantaranya, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Hilirisasi Industri, Infrastruktur, Transformasi Digital di sisi tata kelola pemerintahan serta pembangunan lingkungan dan ketahanan bencana. Fokus pertama di sisi pendidikan berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, kemudian, mentransformasi untuk memanfaatkan digital yang tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi infrastruktur, yakni fokus membangun jalan-jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan-kawasan industri di Batulicin maupun

Banjarbakula. Kemudian, membangun dan mendorong kemajuan industri, tidak hanya sebatas menjual batubara mentah saja, menjual CPO saja atau pun menjual karet saja, tapi industri turunannya. Kemudian masalah lingkungan, seperti pengendalian tingkat pencemaran air Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dikategori sedang, dan menjaga kelestarian hutan salah satunya melalui geopark meratus dan penghijauan serta pengendalian banjir.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANG

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam perencanaan organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Tujuan dan Sasaran Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2025 yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- 2) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Inovasi Daerah.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- 4) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Sehingga Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran untuk dilaksanakan pada tahun 2025 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.
TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANG KAB. TAPIN

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2025	KONDISI AKHIR PERIODE
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,25	80,65
2.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80	75
3.	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	8.10	8,2
4.	Meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Indeks Government Awards (IGA)	67	70

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dijabarkan Bappelitbang ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Bappelitbang Kabupaten Tapin. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bappelitbang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapin

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BAPPELITBANG				19.360.633.051,00				10.428.206.964,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.360.633.051,00				10.428.206.964,00
5	01				PERENCANAAN				17.139.580.475,00				10.233.206.964,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Bappelitbang	26,00 26,00 12,00 18,00 100% 100% 4.00	11.179.072.645,00	PAD		27,00 27,00 12,50 20,00 100 % 100 % 4.00	7.725.063.964,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	Bappelitbang	100 % 100 % 100 %	109.257.500,00	PAD		100 % 100 % 100 %	60.000.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbang	5 Dokumen	46.390.000,00	PAD		8 Dokumen	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbang	11 Laporan	62.867.500,00	PAD		11 Laporan	30.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	Bappelitbang	100 % 100 %	4.772.656.788,00	PAD		100 % 100 %	5.265.063.964,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbang	25 Orang	4.682.401.788,00	DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	5.235.063.964,00
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	37.365.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	52.890.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Bappelitbang	100%	3.903.857.895,00	PAD		100%	1.245.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	56.549.100,00	PAD		1 Paket	35.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	486.402.700,00	PAD		1 Paket	425.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	336.817.520,00	PAD		1 Paket	100.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	52.840.200,00	PAD		1 Paket	20.000.000,00
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	112.676.600,00	PAD		1 Paket	150.000.000,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappelitbang	1 Laporan	26.100.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	2.832.471.775,00	PAD		1 Laporan	500.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Bappelitbang	100%	596.709.900,00	PAD		100%	200.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappelitbang	10 Unit	596.709.900,00	PAD		10 Unit	200.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Bappelitbang	100 %	1.097.160.202,00	PAD		100%	675.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	783.595.592,00	PAD		1 Laporan	450.000.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	68.291.250,00	PAD		1 Laporan	125.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	245.273.360,00	PAD		1 Laporan	100.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Bappelitbang	100%	699.430.360,00	PAD		100%	280.000.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappelitbang	10 Unit	216.897.120,00	PAD		10 Unit	195.000.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappelitbang	1 Unit	109.723.240,00	PAD		1 Unit	35.000.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbang	1 Unit	372.810.000,00	PAD		1 Unit	50.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data Persentase proses perencanaan pembangunan daerah tepat waktu persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Kab. Tapin	100%	4.385.612.830,00	PAD		100%	1.635.000.000,00
							100%				100%	
							90%				100%	
							100%				100%	
							93%				95%	
							85%				90%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Tapin	100%	3.097.538.830,00	PAD		100%	1.095.000.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Daerah	Kab. Tapin	3 Dokumen	290.950.000,00	PAD		2 Dokumen	60.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1 Berita Acara	307.688.750,00	PAD		1 Berita Acara	60.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	2 Berita Acara	771.725.360,00	PAD		1 Berita Acara	250.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Tapin	405 Usulan	413.681.720,00	PAD		405 Usulan	225.000.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Tapin	2 Dokumen	1.313.493.000,00	PAD		3 Dokumen	500.000.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	Kab. Tapin	90%	628.982.000,00	PAD		100%	270.000.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Tapin	1 Dokumen	244.000.000,00	PAD		1 Dokumen	150.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Tapin	53 Orang	384.982.000,00	PAD		53 Orang	120.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	Kab. Tapin	100 % 100 %	659.092.000,00	PAD		100 % 100 %	270.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapin	1 Laporan	494.742.000,00	PAD		1 Laporan	170.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tapin	4 Laporan	164.350.000,00	PAD		4 Laporan	100.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur Perangkat Daerah Tepat waktu Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur	Kab. Tapin	100%	1.574.895.000,00	PAD		100%	873.143.000,00
							100%			100%		
							100%			100%		
							85%			90%		
							100%			100%		
							100%			100%		
							100%			100%		
							85%			90%		

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	Kab. Tapin	100 %	1.057.385.000,00	PAD		100 %	413.143.000,00
			Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang SDM Sesuai Jadwal dan Ketentuan		100 %		100 %					
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %		100 %					
			Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan		100 %		100 %					
			Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %		100 %					
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %		100 %					
			Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan		100 %		100 %					
			Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti		100 %		100 %					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial Sesuai Jadwal dan Ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti		100 %				100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	3 Dokumen	89.250.000,00	PAD		2 Dokumen	63.143.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	3 Laporan	77.790.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	4 Laporan	72.050.000,00	PAD		4 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	1 Laporan	301.120.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	3 Dokumen	91.870.000,00	PAD		2 Dokumen	65.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	3 Laporan	82.385.000,00	PAD		2 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	4 Laporan	47.670.000,00	PAD		4 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	1 Laporan	295.250.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai Jadwal dan Ketentuan Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi Sesuai dengan ketentuan Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi ditindaklanjuti	Kab. Tapin	100 %	276.710.000,00	PAD		100 %	260.000.000,00
								100 %				100 %	
								100 %				100 %	
								100 %				100 %	
								100 %				100 %	
								100 %				100 %	
								100 %				100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	3 Dokumen	75.980.000,00	PAD		2 Dokumen	75.000.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	3 Laporan	90.100.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	4 Laporan	69.360.000,00	PAD		4 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	1 Laporan	29.050.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	1 Dokumen	12.220.000,00	PAD		1 Dokumen	50.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	Kab. Tapin	100 %	240.800.000,00	PAD		100 %	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai Jadwal dan Ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang infrastruktur ditindaklanjuti		100 %				100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	3 Dokumen	82.120.000,00	PAD		2 Dokumen	65.000.000,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	3 Laporan	91.170.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	4 Laporan	38.460.000,00	PAD		4 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	1 Laporan	29.050.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.221.052.576,00				195.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	Kab. Tapin	100 % 100 % 76,69 %	2.221.052.576,00	PAD		100 % 100 % 79,75 %	195.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	Kab. Tapin	100 % 100 % 100 % 100 %	1.224.613.000,00	PAD		100%	50.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Tapin	1 Dokumen	691.178.550,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Tapin	1 Dokumen	533.434.450,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung inovasi daerah Persentase peserta bimbingan teknis yang menghasilkan inovasi Persentase inovasi daerah yang direplikasi Persentase fasilitasi inovasi daerah yang direplikasi Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti Persentase inovasi daerah yang dibina.	Kab. Tapin	33,74 90% 25,93% 100% 76,69% 100%	996.439.576,00	PAD		36,81 100% 25,93% 100% 79,75% 100%	145.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tapin	1 Dokumen	146.978.000,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Tapin	1 Laporan	641.146.276,00	PAD		1 Laporan	20.000.000,00
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Tapin	1 Laporan	106.839.300,00	PAD		1 Laporan	75.000.000,00
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tapin	1 Laporan	101.476.000,00	PAD		1 Laporan	25.000.000,00
J U M L A H									19.360.633.051,00				10.428.206.964,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang 2024-2026 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang mana merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Bappelitbang, penyusunan Renja 2025 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Bappelitbang maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Tahun 2025.

Rantau, Juli 2024

Pi BUPATI,



M. Syarifuddin
M. SYARIFUDDIN, M.Pd.

Lampiran

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Kabupaten Tapin
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP: Perencanaan Kinerja	-	24,60	24,60	24,60	100%	25,00	74,20	-
		Pengukuran Kinerja	-	23,70	23,70	23,70	94,80%	25,00	72,40	-
		Pelaporan Kinerja	-	11,55	11,55	11,55	100%	11,55	34,65	-
		Evaluasi Internal	-	16,75	16,75	16,75	93,84%	16,80	50,30	-
		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	0	100%	1	100	1	2	-
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	1	1	100%	1	100	1	3	300,00%	
	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	4	0	4	3,56	89%	4	7,56	189,00%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10	3	3	100%	6	19	190,00%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	11	11	100%	11	25	833,33%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)								
5.01.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	23	22	95,65%	25	47	-
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	31,45%	83,28%	264,80%	80%	163,28%	-
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	1	100%	10	163,28%	-
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0	0	31,45	83,28%	264,80%	80%	163,28%	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10	10	100%	10	30	300,00%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	1	1	100%	20	21	-
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
		Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan: Persen)	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data (Dengan Satuan: Persen)	0	0	80%	80%	100%	80%	160%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	92%	192%	-
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan: Persen)	80%	124,27%	80%	94,66%	118,32%	80%	299%	373,66%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.02.2.01.01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0	0	1	1	100%	2	3
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0	3	1	1	100%	2	6	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	0	1	1	1	100%	1	3	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0	0	0	0	0%	405	405	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang	0	12	1	1	100%	3	16	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)								
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	0	0	80%	80%	100%	80%	160%	-
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.0.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	0	0	0	0	0	53	53	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan IK 2: Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	4	4	4	100%	4	12	300,00%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM, yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar								
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu indikatif)	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu indikatif)	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200,00%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM	80%	0	80%	285,71%	357,14%	80%	366%	457,14%
		Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur	80%	0	80%	131,38%	164,23%	80%	211%	264,23%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang sosial sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)								
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.0.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	3	3	100%	3	8	400,00%
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	100%	3	5	500,00%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	4	4	4	4	100%	4	12	300,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan		
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA	
	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	3	3	100%	3	8	400,00%	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	1	1	1	100%	3	5	500,00%	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	4	4	100%	4	12	300,00%	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-	
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%	
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Ekonomi (Dengan Satuan: Persen)								
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	3	3	100%	3	8	400,00%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	1	1	1	100%	3	5	500,00%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	4	4	100%	4	12	300,00%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300,00%
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	2	2	3	3	100%	3	8	400,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	1	1	100%	3	5	500,00%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	4	4	4	100%	4	12	300,00%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
		Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan: Persen)	0	0	70,00%	61,35%	87,64%	73,62%	135%	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan: Persen)	0	0	60%	100%	166%	100%	200%	-
		Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)	0	0	50%	100%	200%	100%	200%	-
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan: Persen)	0	0	100%	100%	100%	100%	200%	-
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (RENSTRA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s.d. tahun berjalan	
					Target RENJA 2023	Realisasi RENJA 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target RENJA
	Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Pertanian, Perkebunan dan Pangan								
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	0	0	24,54	0	0,00%	30,67%	30,67%	-
		Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	0	0	100	0	0%	90%	90,00%	-
		Persentase inovasi daerah yang direplikasi	0	0	73,61	0	0,00%	25,93%	25,93%	-
		Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	0	0	100	0	0%	100%	100,00%	-
		Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	0	0	95	0	0,00%	76,69%	76,69%	-
		Persentase Inovasi Daerah yang dibina	0	0	50	0	0%	100%	100,00%	-
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	0	1	1	100%	1	2	-
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	1	1	-

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.360.633.051	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.104.752.246
	PERENCANAAN				17.139.580.475	PERENCANAAN				18.747.875.046
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Nilai Komponen AKIP:</i> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan: Nilai)	25,00 25,00 11,55 16,80	11.179.072.645	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		<i>Nilai Komponen AKIP:</i> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan: Nilai)	25,00 25,00 11,55 16,80	10.994.266.573
			<i>Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100				<i>Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	
			<i>Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan: Persen)</i>	100				<i>Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	
			<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan: Score)</i>	4				<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat (Dengan Satuan: Score)</i>	4	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	109.257.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	109.257.500
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	<i>Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	46.390.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	46.390.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11.00	62.867.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11.00	62.867.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100	4.772.656.788	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (Dengan Satuan: Persen)	100	4.772.656.788
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Dengan Satuan: Persen)	100	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25.00	4.682.401.788	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25.00	4.682.401.788
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	37.365.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	37.365.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.00	52.890.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.00	52.890.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (%)	100	3.903.857.895	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN (%)	100	3.903.857.895
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	56.549.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	56.549.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	486.402.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	486.402.700
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	336.817.520	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	336.817.520
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	52.840.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	52.840.200

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
5	Penyediaan Bahan/Material	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	112.676.600	Penyediaan Bahan/Material	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	112.676.600
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	26.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	26.100.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.832.471.775	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2.832.471.775
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100	596.709.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100	596.709.900
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10.00	596.709.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10.00	596.709.900
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik. (Dengan Satuan: Persen)	100	1.097.160.202	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik. (Dengan Satuan: Persen)	100	1.097.160.202
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	783.595.592	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	783.595.592
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	68.291.250	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	68.291.250
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	245.273.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	245.273.360
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan: Persen)	83,5	699.430.360	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan :Persen) (%)	100	699.430.360
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	216.897.120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	216.897.120
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	109.723.240	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	109.723.240

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	372.810.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	372.810.000
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)	100	4.385.612.830	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)	100	4.385.612.830
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan: Persen)			100	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) (Dengan Satuan: Persen)				100		
Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data (Dengan Satuan: Persen)			90	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data (Dengan Satuan: Persen)				90		
Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)			100	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)				100		
Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persen)			93	Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dengan Satuan: Persen)				93		
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan: Persen)			85	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah (Dengan Satuan: Persen)				85		
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	(KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	3.097.538.830	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	(KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	3.097.538.830
(KAB. TAPIN)		Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	(KAB. TAPIN)			Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100		
(KAB. TAPIN)		Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	(KAB. TAPIN)			Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100		
(KAB. TAPIN)		Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	(KAB. TAPIN)			Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
		(KAB. TAPIN)	<i>Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100			(KAB. TAPIN)	<i>Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	
		(KAB. TAPIN)	<i>Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	90			(KAB. TAPIN)	<i>Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	90	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		290.950.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3	
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.00	307.688.750	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	307.688.750
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	771.725.360	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	771.725.360
4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	405.00	413.681.720	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	405.00	413.681.720
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3.00	1.313.493.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2	1.313.493.000
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)	100	628.982.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)	100	628.982.000
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1.00	384.982.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1.00	384.982.000
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	53	244.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	53	244.000.000
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai (Persentase)	100	659.092.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai (Persentase)	100	659.092.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1.00	494.742.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1.00	494.742.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1.00	164.350.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1.00	164.350.000
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)	100	1.574.895.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)	100	1.574.895.000
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)			100	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan: Persen)				100		
Persentase Keselarasan Renja OPD bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)			100	Persentase Keselarasan Renja OPD bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)				100		
Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)			100	Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)				100		
Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan :Persen)			100	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)				100		
Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)			100	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perangkat Daerah yang Tepat waktu (Dengan Satuan: Persen)				100		
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM (Dengan Satuan: Persen)			85	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM (Dengan Satuan: Persen)				85		
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)			85	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)				85		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	1.057.385.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	1.057.385.000
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang sosial sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang sosial sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan :Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan :Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti (Dengan Satuan :Persen)	100	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	89.250.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	89.250.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	77.790.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	77.790.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	72.050.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	72.050.000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	301.120.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	301.120.000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	91.870.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	91.870.000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	82.385.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	82.385.000
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	47.670.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	47.670.000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	295.250.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	295.250.000
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	276.710.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	276.710.000
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Ekonomi (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Ekonomi (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Ekonomi ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPД)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPД)(Dokumen)	2	75.980.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPД)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPД) (Dokumen)	3	75.980.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	90.100.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	3	90.100.000
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	69.360.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	69.360.000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPД/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	29.050.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPД/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	29.050.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	12.220.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	12.220.000
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	240.800.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Jadwal Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	240.800.000
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Jadwal dan Ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang	100			(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Infrastruktur ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten TApin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	82.120.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(Kabupaten TApin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	82.120.000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	91.170.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	91.170.000
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	38.460.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	38.460.000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	29.050.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(Kabupaten Tapin)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	29.050.000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.221.052.576	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.356.877.200
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		<i>Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	2.221.052.576	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		<i>Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	2.221.052.576
			<i>Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100				<i>Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	
			<i>Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan: Persen)</i>	76,69				<i>Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan (Dengan Satuan: Persen)</i>	76,69	
1	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	<i>Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	1.224.613.000	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	(Bappelitbang , KAB. TAPIN)	<i>Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	1.224.613.000
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	<i>Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan: Persen)</i>	100			(Bappelitbang , KAB. TAPIN)	<i>Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis (Dengan Satuan: Persen)</i>	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan: Persen)	100	
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan: Persen)	100			(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi (Dengan Satuan: Persen)	100	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1.00	691.178.550	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1.00	691.178.550
2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1.00	533.434.450	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1.00	533.434.450
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	33,74	996.439.576	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(KAB. TAPIN)	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung Inovasi Daerah	33,74	996.439.576
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	90			(KAB. TAPIN)	Persentase peserta Bimbingan Teknis yang menghasilkan inovasi	90	
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase inovasi daerah yang direplikasi	25.93			(KAB. TAPIN)	Persentase inovasi daerah yang direplikasi	25.93	
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100			(KAB. TAPIN)	Persentase fasilitasi inovasi daerah yang di replikasi	100	
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	76,69			(KAB. TAPIN)	Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	76,69	
		(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100			(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase Inovasi Daerah yang dibina	100	
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1.00	146.978.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1.00	146.978.000
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1.00	641.146.276	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1.00	641.146.276

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGE T 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1.00	106.839.300	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(Bappelitbang, KAB. APIN)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1.00	106.839.300	
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1.00	101.476.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	(Bappelitbang, KAB. APIN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1.00	101.476.000	
J U M L A H					19.360.633.051						22.104.752.246

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tapin
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BAPPELITBANG				19.360.633.051,00				10.428.206.964,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.360.633.051,00				10.428.206.964,00
5	01 PERENCANAAN				17.139.580.475,00				10.233.206.964,00
5	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP: - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Kinerja Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Bappelitbang	26,00 26,00 12,00 18,00 100 % 100 % 4,00	11.179.072.645,00	PAD		27,00 27,00 12,50 20,00 100 % 100 % 4,00	7.725.063.964,00
5	01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	Bappelitbang	100 % 100 % 100 %	109.257.500,00	PAD		100 % 100 % 100 %	60.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbang	5 Dokumen	46.390.000,00	PAD		8 Dokumen	30.000.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbang	11 Laporan	62.867.500,00	PAD		11 Laporan	30.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	Bappelitbang	100 % 100 %	4.772.656.788,00	PAD		100 % 100 %	5.265.063.964,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbang	25 Orang	4.682.401.788,00	DANA ALOKASI UMUM		25 Orang	5.235.063.964,00
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	37.365.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	52.890.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Bappelitbang	100%	3.903.857.895,00	PAD		100%	1.245.000.000,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	56.549.100,00	PAD		1 Paket	35.000.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	486.402.700,00	PAD		1 Paket	425.000.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	336.817.520,00	PAD		1 Paket	100.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	52.840.200,00	PAD		1 Paket	20.000.000,00
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bappelitbang	1 Paket	112.676.600,00	PAD		1 Paket	150.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappelitbang	1 Laporan	26.100.000,00	PAD		1 Laporan	15.000.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbang	1 Laporan	2.832.471.775,00	PAD		1 Laporan	500.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Bappelitbang	100%	596.709.900,00	PAD		100%	200.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappelitbang	10 Unit	596.709.900,00	PAD		10 Unit	200.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	Bappelitbang	100 %	1.097.160.202,00	PAD		100%	675.000.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	783.595.592,00	PAD		1 Laporan	450.000.000,00
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	68.291.250,00	PAD		1 Laporan	125.000.000,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappelitbang	1 Laporan	245.273.360,00	PAD		1 Laporan	100.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Bappelitbang	100%	699.430.360,00	PAD		100%	280.000.000,00
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappelitbang	10 Unit	216.897.120,00	PAD		10 Unit	195.000.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappelitbang	1 Unit	109.723.240,00	PAD		1 Unit	35.000.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbang	1 Unit	372.810.000,00	PAD		1 Unit	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program dan Indikator) Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data Persentase proses perencanaan pembangunan daerah tepat waktu persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	Kab. Tapin	100%	4.385.612.830,00	PAD		100%	1.635.000.000,00
								100%				100%	
								90%				100%	
								100%				100%	
								93%				95%	
								85%				90%	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai jadwal dan ketentuan Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti Persentase asistensi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Persentase rekomendasi hasil asistensi dokumen perencanaan daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Tapin	100%	3.097.538.830,00	PAD		100%	1.095.000.000,00
								100%				100%	
								100%				100%	
								100%				100%	
								100%				100%	
								100%				100%	
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Tapin	3 Dokumen	290.950.000,00	PAD		2 Dokumen	60.000.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Tapin	1 Berita Acara	307.688.750,00	PAD		1 Berita Acara	60.000.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	2 Berita Acara	771.725.360,00	PAD		1 Berita Acara	250.000.000,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Tapin	405 Usulan	413.681.720,00	PAD		405 Usulan	225.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Tapin	2 Dokumen	1.313.493.000,00	PAD		3 Dokumen	500.000.000,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	Kab. Tapin	90%	628.982.000,00	PAD		100%	270.000.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Tapin	1 Dokumen	244.000.000,00	PAD		1 Dokumen	150.000.000,00
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Tapin	53 Orang	384.982.000,00	PAD		53 Orang	120.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah yang ditindaklanjuti Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Program Prioritas Daerah sesuai dengan ketentuan	Kab. Tapin	100 % 100 %	659.092.000,00	PAD		100 % 100 %	270.000.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Tapin	1 Laporan	494.742.000,00	PAD		1 Laporan	170.000.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Tapin	4 Laporan	164.350.000,00	PAD		4 Laporan	100.000.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Kab. Tapin	100%	1.574.895.000,00	PAD		100%	873.143.000,00
					Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100%				100%	
					Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sosial dan SDM Perangkat Daerah yang Tepat waktu		100%				100%	
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang sosial dan SDM		85%				90%	
					Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar		100%				100%	
					Persentase Keselarasan Renja OPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)		100%				100%	
					Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur Perangkat Daerah Tepat waktu		100%				100%	
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah bidang ekonomi dan bidang infrastruktur		85%				90%	

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	Kab. Tapin	100 %	1.057.385.000,00	PAD		100 %	413.143.000,00
					Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang SDM Sesuai Jadwal dan Ketentuan		100 %				100 %	
					Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
					Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang SDM Sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
					Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
					Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDM yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
					Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
					Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang SDM ditindaklanjuti		100 %				100 %	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan		100 %				100 %	
						Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Sosial Sesuai Jadwal dan Ketentuan		100 %				100 %	
						Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang Sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
						Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang sosial Sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
						Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
						Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang sosial yang ditindaklanjuti		100 %				100 %	
						Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial sesuai dengan ketentuan		100 %				100 %	
						Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang sosial ditindaklanjuti		100 %				100 %	
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kab. Tapin	3 Dokumen	89.250.000,00	PAD		2 Dokumen	63.143.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	3 Laporan	77.790.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	4 Laporan	72.050.000,00	PAD		4 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Tapin	1 Laporan	301.120.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kab. Tapin	3 Dokumen	91.870.000,00	PAD		2 Dokumen	65.000.000,00
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	3 Laporan	82.385.000,00	PAD		2 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	4 Laporan	47.670.000,00	PAD		4 Laporan	40.000.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Tapin	1 Laporan	295.250.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi Sesuai Jadwal dan Ketentuan Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi Sesuai dengan ketentuan Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi yang ditindaklanjuti Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang ekonomi ditindaklanjuti	Kab. Tapin	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	276.710.000,00	PAD		100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	260.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	3 Dokumen	75.980.000,00	PAD		2 Dokumen	75.000.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	3 Laporan	90.100.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	4 Laporan	69.360.000,00	PAD		4 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Tapin	1 Laporan	29.050.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Tapin	1 Dokumen	12.220.000,00	PAD		1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Jadwal Proses Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sesuai Jadwal dan Ketentuan Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase Asistensi Dokumen Perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti Persentase Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang Infrastruktur sesuai dengan ketentuan Persentase hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan mitra bidang infrastruktur ditindaklanjuti	Kab. Tapin	100 %	240.800.000,00	PAD		100 %	200.000.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kab. Tapin	3 Dokumen	82.120.000,00	PAD		2 Dokumen	65.000.000,00
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	3 Laporan	91.170.000,00	PAD		2 Laporan	35.000.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	4 Laporan	38.460.000,00	PAD		4 Laporan	35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Tapin	1 Laporan	29.050.000,00	PAD		1 Laporan	65.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.221.052.576,00				195.000.000,00
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Policy Brief Penelitian yang dimanfaatkan Persentase Penelitian yang sesuai dengan standar penelitian dan pengembangan Persentase inovasi daerah yang berkelanjutan	Kab. Tapin	100 % 100 % 76,69 %	2.221.052.576,00	PAD		100 % 100 % 79,75 %	195.000.000,00
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti Persentase penelitian dan pengembangan yang sesuai isu strategis Persentase rekomendasi inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindak lanjuti Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Desiminasi	Kab. Tapin	100 % 100 % 100 % 100 %	1.224.613.000,00	PAD		100 % 100 % 100 % 100 %	50.000.000,00
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kab. Tapin	1 Dokumen	691.178.550,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Tapin	1 Dokumen	533.434.450,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovator yang berperan aktif dalam mendukung inovasi daerah Persentase peserta bimbingan teknis yang menghasilkan inovasi Persentase inovasi daerah yang direplikasi Persentase fasilitasi inovasi daerah yang direplikasi Persentase monitoring dan evaluasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti Persentase inovasi daerah yang dibina.	Kab. Tapin	33,74 90% 25,93% 100% 76,69% 100%	996.439.576,00	PAD		33,74 90% 25,93% 100% 76,69% 100%	145.000.000,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Tapin	1 Dokumen	146.978.000,00	PAD		1 Dokumen	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Tapin	1 Laporan	641.146.276,00	PAD		1 Laporan	20.000.000,00
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Tapin	1 Laporan	106.839.300,00	PAD		1 Laporan	75.000.000,00
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Tapin	1 Laporan	101.476.000,00	PAD		1 Laporan	25.000.000,00
J U M L A H									19.360.633.051,00				10.428.206.964,00